

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Jovan Febriantoko

Akuntansi Politeknik PalComTech

Jalan Basuki Rahmat No.05 Palembang

E-mail: [jovan\\_febriantoko@palcomtech..com](mailto:jovan_febriantoko@palcomtech..com)

**Abstrak** - Otonomi daerah merupakan solusi bagi permasalahan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat analisis untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai acuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Pulau Sumatera memiliki 10 Provinsi yang perlu diketahui tingkat kemandirianya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian luantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Jenis data yang digunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD tahun 2014 Provinsi di Pulau Sumatera. Teknik analisis data yang digunakan adalah Derajat Desentralisasi Fiskal. Perhitungan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat disimpulkan bahwa Total PAD Provinsi Se-Pulau Sumatera sebesar 18,025 Triliun dan keseluruhan Total Pendapatan Daerah Provinsi Se-Pulau Sumatera sebesar Rp51,22 Triliun. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 35,19133 % dengan perolehan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu 58,24694 % dan terendah pada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yaitu 11,75206%.

**Kata Kunci** – keuangan daerah, desentralisasi fiskal

### I. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan solusi bagi permasalahan Pemerintah Republik Indonesia mengenai ancaman disintegrasasi bangsa, kemiskinan, ke-tidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya. Sejak diberlakukan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat mendesentralisasikan berbagai kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia, salah satunya desentralisasi pengelolaan keuangan. Desentralisasi pengelolaan keuangan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan keuangan pada daerah pemerintahan sendiri.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya, pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang

komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh badan pemeriksa Keuangan (BPK).

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah[1]. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Ciri utama pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi dengan baik adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber pendapatan keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penyelenggaraan pemerintahannya, dan besaran ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat harus kecil, agar PAD dapat menjadi sumber pendapatan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah lebih optimal[2].

PAD merupakan sumber pendapatan utama sebagai bentuk kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah mempengaruhi pemberdayaan kemampuan perekonomian daerah, memberikan transparansi, partisipasi, dan bertanggung jawab antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang meningkat dapat menggambarkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan suatu daerah, terutama dalam memperbesar pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat analisis untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD sebagai acuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam

membayai pembangunan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya.

Analisis terhadap LRA pemerintah daerah, dapat menggunakan rasio yang mampu memperlihatkan gambaran mengenai kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah sebagaimana berikut[3]:

1. Rasio A = Total Pendapatan Asli Daerah : Total Pendapatan

2. Rasio B = Total Pendapatan Asli Daerah : Total Belanja

Peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan mengurangi ketimpangan antar pemerintah daerah dapat dilakukan adanya inovasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan PAD, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap peningkatkan PAD, peningkatkan Dana Desentralisasi dari pemerintah pusat yang menghasilkan sumber pendapatan yang strategis, dan adanya aturan yang lebih jelas terkait dengan peningkatan PAD di daerah berpenghasilan sumber strategis.

Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi bisa tercapai, dengan asumsi bahwa perlu adanya inovasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD, dan adanya kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD di daerahnya[4].

Analisis rasio keuangan telah digunakan sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan oleh organisasi yang berorientasi kepada keuntungan, akan tetapi dalam lembaga publik atau non profit yaitu pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang dapat menggambarkan kinerja keuangan secara akurat. Pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah harus bersifat transparan, jujur, efektif, efisien, demokratis, dan akuntabel[5]. Analisis Rasio keuangan pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan meskipun masih terdapat perbedaan pada kesepakatan akuntansi yang mendasarinya. Rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, salah satunya dengan rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal)[6].

Pulau sumatera memiliki 10 pemerintah daerah provinsi, provinsi tersebut adalah NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Setiap provinsi memiliki PAD yang akan mempengaruhi tingkat kamampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu penulis akan meneliti tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera dengan derajat desentralisasi fiskal(DDF).

## II. KAJIAN LITERATUR

### A. Landasan Teori

#### 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah daerah atau yang sering kita sebut LKPD merupakan alat pertanggungjawaban. Pengertian laporan keuangan adalah adalah informasi yang disajikan untuk membantu pemangku kepentingan dalam membantu keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas[7]. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP) [8]:

- a) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kecukupan penerimaan selama periode tertentu.
- b) Menyediakan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber-sumber ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dalam undang-undang.
- c) Transparansi terhadap informasi terkait sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk program dan kegiatan suatu organisasi.
- d) Menyediakan transparansi tentang prosedur organisasi pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya dan mencukupi kebutuhan keuangan.
- e) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan organisasi terkait sumber pendapatannya.
- f) Memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan posisi keuangan, sebagai dampak kegiatan yang dilaksanakan.

Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah antara lain[7] :

- a) Memberikan prediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah.
- b) Menyediakan laporan yang digunakan menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintahan daerah dan perubahan yang terjadi.
- c) Alat monitor kinerja pemerintah daerah, ketaatan dengan aturan undang-undang, kontrak, dan ketentuan lainnya.
- d) Memberikan data untuk proses perencanaan dan penganggaran.
- e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
- f) Untuk bisa memahami LKPD dengan baik, pengguna LKPD perlu memahami elemen dalam laporan keuangan.

Jenis-jenis laporan keuangan pemerintah

- a) Neraca
- b) Laporan realisasi anggaran (LRA)
- c) Laporan arus kas (LAK)
- d) Catatan atas laporan keuangan

#### 2) Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan juga sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat diakui sebagai kekayaan daerah sejajarnya belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku[6]

Manajemen dan pengelolahan keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolahan sumber ekonomi atau kekayaan pada suatu daerah dengan tujuan tertentu yang dikehendaki. Alat untuk melaksanakan pengelolahan dan manajemen keuangan pada pemerintah daerah disebut dengan tata usaha keuangan daerah.

Menurut peraturan perundangan terbaru yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang di dasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003. Tugas pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- b) Menyusun rancangan dan perubahan APBD.
- c) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui perturan daerah.
- d) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- e) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APDB.

### 3) Analisis rasio keuangan

Analisis mengenai rasio keuangan pada APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai. Pengukuran ini dapat dilakukan membandingkan antar periode akuntansi atau dapat melakukan perbandingan dengan rasio keuangan yang pemerintah daerah yang lain yang terdekat atau memiliki potensi yang mirip[8]. Penggunaan rasio keuangan dalam pemerintah daerah adalah :

- a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b) Pihak pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi
- c) Pemerintah pusat sebagai bahan masukan

### 4) Pendapatan asli daerah

PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah tertentu sendiri[9]. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

#### a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa sesuai undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan manfaatnya untuk keperluan daerah dan masyarakat[10].

#### b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang secara mandiri dilakukan pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah[11].

#### c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara(BUMN) atau BUMD.

#### d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;

PAD memiliki tujuan mendeklasifikasi kepada pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi.

### 5) Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang

diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah[12]. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Analisis Rasio kemandirian akan memberikan gambaran mengenai ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan yang bersifat eksternal[13]. Semakin besar rasio kemandirian akan menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Dari pengertian di atas maka formula dari kemandirian pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal sebagaimana berikut.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Berdasarkan formula DDF diatas dapat menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio tingkat kemampuan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel I. Tingkat kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Sangat Kurang	00,00%-10,00%
Kurang	10,01%-20,00%
Cukup	20,01%-30,00%
Sedang	30,01%-40,00%
Baik	40,01%-50,00%
Sangat Baik	>50,00%

Sumber: [6]

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama sebelumnya telah dilakukan oleh Dwirandra [14]. Melakukan penelitian tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006. Dalam penelitian ini analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian digunakan sebagai alat analisis kabupaten/kota di Bali dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, rasio efektivitas memiliki besaran 75,01% sampai dengan di atas 100%. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sedang dan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh [15] disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja PEMDA Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Majalengka dengan dengan analisis rasio keuangan yang terdiri dari

Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Majalengka pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003-2007. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari kurun waktu 2003-2007 Pemda Kabupaten Majalengka belum mampu membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercermin dari rendahnya kemandirian keuangan daerah selama kurun waktu tersebut dengan rasio paling tinggi sebesar 7,14% yang dalam hal ini termasuk kurang mandiri. Tingkat efektivitas berturut-turut dari tahun 2003-2007 adalah 97,41%, 100,66%, 99,07%, 106,89%, 98,79% yang dalam hal ini termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efisiensi berturut-turut dari tahun 2003-2007 adalah 16,53%, 16,38%, 11,00%, 21,31%, 35,72% yang berarti dalam hal ini termasuk ke dalam kategori sangat efisien. Kabupaten Majalengka memiliki belanja daerah yang diprioritaskan pada Belanja Rutin. Rasio Belanja Rutin terhadap total APBD berkisar dari 75,06% hingga 91,56%. Sedangkan Rasio Pembangunan yaitu berkisar dari 8,44% hingga 24,94%. Rasio Pertumbuhan Pendapatan baik anggaran maupun realisasinya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemda kabupaten Majalengka tahun anggaran 2003-2007 sudah cukup baik.

Penelitian [16] bertujuan untuk mengetahui proporsi dan pertumbuhan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah Propinsi D.I. Yogyakarta periode tahun anggaran 1999/2000-2003, mengetahui proporsi dan pertumbuhan sumber-sumber PAD terhadap total realisasi PAD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun anggaran 1999/2000-2003, dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas PAD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun anggaran 1999/2000-2003. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi pustaka terhadap dokumentasi publikasi dan laporan instansi terkait dengan masalah penelitian ini. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif-analitis. Penelitian ini memberikan gambaran yang berkaitan dengan kontribusi dan pertumbuhan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingginya tingkat ketergantungan finansial Pemda Popinsi D.I. Yogyakarta., kinerja Pemda Propinsi D.I. Yogyakarta dalam upaya meningkatkan keuangan daerah khususnya yang bersumber dari PAD selama periode analisis relatif masih rendah, sehingga pelaksanaan otonomi belum sepenuhnya didukung oleh kemandirian daerah secara finansial, tingkat efisiensi Pemda Popinsi D.I. Yogyakarta tergolong dalam kriteria cukup efisien, namun terdapat kecenderungan aktivitas pemungutan PAD mengarah pada kondisi tidak etisien, tingkat efektivitas Pemda Popinsi D. I. Yogyakarta tergolong dalam kriteria sangat efektif, namun selama

periode analisis cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi pada 10 Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

#### C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD tahun 2014 yang berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di pemerintah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera.

#### D. Teknik Analisis Data

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Cara pengukurannya adalah dengan menghitung DDF sebagaimana berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan formula di atas dapat dikategorikan sesuai dengan tabel 1.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Nanggroe Aceh Darussalam

Berdasarkan formula Rasio DDF, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh memperoleh hasil sebagaimana berikut:

Tabel II. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
NAD	1,312	0,117521	11,75206
	11,164		

Hasil penghitungan Rasio DDF diatas dapat ditarik sebuah penilaian bahwa tingkat Kemandirian dan derajat desentralisasinya masih “Kurang” karena hanya sebesar 11,75206 %.

## B. Sumatera Utara

Tabel III. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Utara

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Sumatera Utara	4,944	0,582469	58,24694
	8,488		

Sumatera utara memiliki Rasio kemandirian dan derajat desentralisasi yang “Sangat Baik”. 58,24694%, artinya dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera utara hanya memiliki ketergantungannya terhadap Dana Pusat/Fiskal Pusat Sebesar 3,544 Triliun Rupiah atau 41,75%.

## C. Sumatera Barat

Berdasarkan rasio Kemandirian Keuangan dan DDF Sumatera Barat memperoleh hasil 44,83843 %. Angka yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikategorikan “Baik”.

Tabel IV. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Barat

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Sumatera Barat	1,568	0,448384	44,83843
	3,497		

## D. Riau

Tabel V. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Riau

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Riau	2,84	0,398541	39,85406
	7,126		

Tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa Provinsi Riau pendapatan tahun 2014 sebesar 7,126 Triliun Rupiah , PAD yang diperoleh sebesar Rp. 2,840 atau 39,85% “ratio kemandiriannya “sedang ”. ratio kemandirian keuangan daerah dan DDF “sedang “39,85%”. Angka 39,85% DDF menunjukkan bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan dan percepatan daerah di provinsi riau ketergantungannya terhadap transfer dana dari pusat/fiskal pusat senilai 4,286 Triliun rupiah atau 60,15% .

## E. Jambi

Tabel VI. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jambi

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		

Jambi	0,973 2,981	0,326401	32,64005
-------	----------------	----------	----------

Besaran DDF 32,64005% menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki kategori Derajat Desentralisasi yang “Sedang”

## F. Sumatera Selatan

Tabel VII. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Sematera Selatan	2,482	0,347814	34,78139
	7,136		

Tabel diatas Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan total penerimaan tahun 2014 sebesar 7,136 Triliun Rupiah. PAD yang sebesar 2,482 Triliun rupiah atau 34,78%. Rasio kemandirian keuangan serta derajat desentralisasi keuangannya “sedang “ 34,78%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dana dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketergantungannya pada pemerintah pusat 4,654 Triliu rupiah atau 65,22%.

## G. Bengkulu

Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki total penerimaan APBD tahun 2014 sebesar 1,805 Triliun rupiah, PAD yang diterima sebesar Rp. 532 miliar atau 29,52%. rasio kemandirian dan derajad desentralisasi keuanganya dalam kategori “cukup“ 29,52%. Angka 29,25% menunjukkan bahwa biaya pembangunan untuk percepatan di provinsi bengkulu ketergantungannya pada pemerintah pusat/fiskal pusat sebesar Rp.1,272 T atau 70,48%.

Tabel VII. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Bengkulu

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Bengkulu	0,532	0,294737	29,47368
	1,805		

## H. Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki total penerimaan dalam APBD periode tahun 2014 sebesar 4,298 Triliun rupiah. PAD-yang diterimasebesar 2,005 Triliun rupiah atau 46,65%. Tingkat kemandirian keuangan daerah dan ddf kategori “ baik “ yaitu 46,65%”. Rasio DDF pada Provinsi lampung memiliki artian bahwa Provinsi Lampung memiliki ketergantungannya pada dana pusat sebesar 2,293 Triliun rupiah atau 46,65%.

Tabel IX. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Lampung

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Lampung	2,005	0,466496	46,6496
	4,298		

### I. Kepulauan Riau

Tabel X. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Riau

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Kepulauan Riau	0,875	0,294613	29,46128
	2,97		

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki pendapatan APBD sebesar 2,970 Triliun rupiah di tahun 2014. Penerimaan PAD sebesar 875 miliar atau 29,49%. Rasio kemandirian keuangan daerah dan DDF keuangannya “cukup” 29,49%. Rasio 29,49% menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ketergantungannya pada dana pemerintah pusat sebesar .2,094 Triliun atau 70,51%.

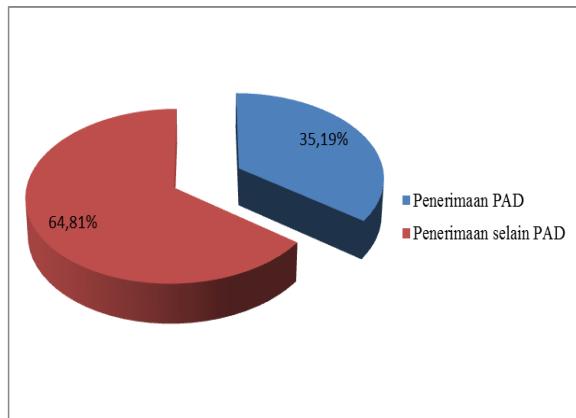
### J. Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung total pendapatan dalam APBD sebesar 1,755 Triliun rupiah ditahun 2014. Total perolehan PAD-nya sebesar Rp.494 miliar atau 28,15%. Rasio kemandirian keuangan daerah dan DDF Provinsi Bangka Belitung kategori “ cukup“ yaitu 28,15%. Angka 28,15% tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan biaya pembangunan di Provinsi Bangka Belitung masih memiliki ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat sebesar 1,261 Triliun rupiah atau 71,85%.

Tabel XI. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Bangka Belitung

Provinsi	PADt	DDF	%
	TPDt		
Bangka Belitung	0,494	0,281481	28,14815
	1,755		

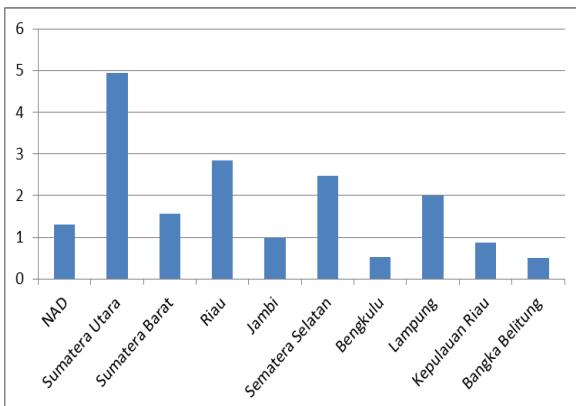
Perhitungan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat dijumlahkan bahwa Total PAD Provinsi Se-Pulau Sumatera sebesar 18,025 Triliun dan keseluruhan Total Pendapatan Daerah Provinsi Se-Pulau Sumatera sebesar 51,22 Triliun. Persentase perbandingan jumlah penerimaan PAD dibandingkan total pendapatan daerah sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Persentase Perbandingan Penerimaan PAD dan Penerimaan selain PAD

Rata rata DDF sebesar 35,19133 % dengan perolehan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu 58,24694 % dan terendah pada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yaitu 11,75206%.

PAD adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 4,944 Triliun dan Pendapatan Asli Daerah terkecil pada tahun 2014 adalah Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 0,494 Triliun. Untuk melihat lebih jelas mengenai perbandingan Derajat desentralisasi fiskal akan dijelaskan sebagaimana gambar 2.



Gambar 2. Grafik DDF Provinsi di Pulau Sumatera

Grafik DDF ditas menunjukkan bahwa Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera belum mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri. Dana transfer dari pemerintah pusat menjadi penerimaan yang dominan di bandingkan PAD pada keuangan seluruh Provinsi di Pulau Sumatera.

### V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat dikategorikan belum mandiri karena rata-rata yang dimiliki hanya sebesar 35,19133 %.
- Peranan PAD masih kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan dan dapat diartikan didalam

penyusunan RAPBD belum didukung oleh konsep kemandirian daerah secara keuangan.

## VI. SARAN

1. Penggalian potensi daerah untuk meningkatkan tingkat kemandirian lebih lanjut agar PAD meningkat.
2. Perancangan APBD sebaiknya menyertakan konsep efisiensi dan efektivitas

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

## REFERENSI

- [1] Basri, Hasan, Syaparudin, and Junaidi. 2013. "Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 1 (2): 81–90. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/1497>.
- [2] Botutihe, Tutun Hermawanto. 2014. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO." *KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis* 2 (1): 1–14. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- [3] Efendi, David, and Sri Wuryanti. 2011. "Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan 2011*, 1–10. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/400>.
- [4] Fatimatuzzahra, Fuji. 2009. "Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Pemda Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Majalengka." Universitas Widyatama. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6264>.
- [5] Fitri, Vella Kurniasih, Muhammad Rasuli, and Alfiati Silfi. 2014. "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* 1 (1): 1–15.
- [6] Halim, Abdul, Wihana Kirana Jaya, and Nasir Azis. 2012. "Legalitas, Peluang, Dan Hambatan Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Negara Dan Daerah (E-SIKD) Yang T." *Kajian Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal*.
- [7] Hally, Hadiwijaya Mario. 2014. "PERANAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2001-2006." *Universitas Jember Digital Repository*.
- [8] Julitawati, Ebit, Darwanis, and Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh." *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1 (1): 15–29.
- [9] Mahi, Raksaka. 2005. "Peran Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*. <http://jepi.fe.ui.ac.id/ojs/index.php/JEPI/article/view/109>.
- [10] Mardiasmo. 2002. "Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah." *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia* 6 (1): 63–82.
- [11] Martini, Kadek, and A.A. N.B. Dwirandra. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi* 10 (2): 426–43.
- [12] Mudhofar, Kurniatul, and Afrizal Tahar. 2016. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Efek Moderasi Dari Kinerja." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 17 (2): 176–85. doi:10.18196/jai.2016.0053.176-185.
- [13] Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. "Developing a Measure of Local Government's Financial Condition." *Journal of Indonesian Economy and Business* 29 (2): 142–64.
- [14] Sari, Idha Kartika Tirta. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003." Universitas Islam Indonesia. <https://simpus.uui.ac.id/search/?n=007263&l=100&b=I&j=SK>.
- [15] Setyaningrum, Dyah, and Febriyani Syafitri. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 9 (2): 154–70.
- [16] Seymour, Richard, and Sarah Turner. 2002. "Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment." *New Zealand Journal of Asian Studies* 4 (2): 33–51. <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec02/Seymour-Turner.pdf>.